



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

## BULETIN DJPI Edisi Mei 2019

### Koordinasi Tindak Lanjut Proyek KPBSPAM Jatiluhur dan SPAM Djuanda

**D**irektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Proyek KPBSPAM Jatiluhur I dan SPAM Djuanda, Kamis (2/5) di Jakarta. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah mengkoordinasikan perkembangan dan menindaklanjuti *Pending Issues* dalam Proyek KPBSPAM Jatiluhur I dan SPAM Djuanda.

Acara dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan *stakeholder* antara lain Kepala Divisi *Underwriting* Penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), *Special Expertise* dari Perum Jasa Tirta II, perwakilan Biro Hukum, perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan perwakilan Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi serta Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dari DJPI.

Dalam pembahasan SPAM Jatiluhur I terdapat beberapa poin yang disampaikan seperti penambahan alokasi air baku untuk SPAM Jatiluhur I sekitar 5-10% dari alokasi air baku awal. Selanjutnya, mengantisipasi isu pemindahan lokasi *taping point/ offtake* dari PDAM Baghasasi di Kabupaten Bekasi yang akan berdampak pada perubahan volume pengambilan air baku. Sedangkan dalam pembahasan SPAM Djuanda terdapat beberapa poin yang disampaikan yaitu mengenai *Ability To Pay (ATP)* dan sistem distribusi. Kedua proyek KPBSPAM Jatiluhur I dan SPAM Djuanda merupakan proyek SPAM Regional. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Direktorat Jenderal Cipta Karya supaya berjalan dengan baik dan sinkronisasi.

### DAFTAR ISI

Koordinasi Tindak Lanjut Proyek KPBSPAM Jatiluhur dan SPAM Djuanda.....	1.
Tinjau Ruas Tol Balikpapan – Samarinda – Bontang.....	2.
Rapat Pembahasan Proyek KPBSPAM Sektor Jalan dan Jembatan.....	2.
<i>Focus Group Discussion</i> Evaluasi Kajian Studi Kelayakan Proyek KPBSPAM Karian.....	3.
Rapat Pembahasan Admin Aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG).....	3.
Rapat Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).....	4.

### DARI REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan atas terbitnya Buletin Edisi Mei 2019 yang diharapkan dapat menjadi media informasi internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Buletin ini menyajikan informasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan masing-masing unit kerja di DJPI pada bulan Mei 2019 antara lain Koordinasi Tindak Lanjut Proyek KPBSPAM Jatiluhur dan PAM Djuanda, Rapat Pembahasan Proyek KPBSPAM Sektor Jalan dan Jembatan, *Focus Group Discussion* Evaluasi Kajian Studi Kelayakan Proyek KPBSPAM Karian serta Rapat Pembahasan Admin Aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG). Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca buletin bulanan ini.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT





**D**irektur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto melakukan tinjau lapangan ke Ruas Jalan Tol Balikpapan – Samarinda– Bontang Jumat (3/5). Didampingi Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Reni Ahiantini, Kepala Subdirektorat Penyiaian dan Kerjasama Investasi, Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktur Teknis PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda dan perwakilan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII – Balikpapan.

Beberapa hal penting dalam tinjauan tersebut adalah Pemerintah Kalimantan Timur merencanakan pembangunan jalan bebas hambatan/tol, sepanjang 323 km yang meliputi ruas jalan Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sangata-Maloy. Ruas tol ini terkoneksi dengan kawasan Bandara Samarinda Baru APT Pranoto, Jemabran Mahkota II, Bontang Lestasi dan Kawasan Klaster Industri Berbasis Oleochemical dan Migas Kondensat Bontang dan KIPi Maloy – Batuta.

Terkait dengan Ruas Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ditandatangani pada

tanggal 9 Juni 2016 dan dilaksanakan oleh PT Jasa Marga Samarinda (JBS) dengan total 99,350 km. total panjang tersebut dibagi menjadi 5 (lima) seksi yaitu Seksi 1 (KM 13 – Samboja) sepanjang 21,980 km; Seksi 2 (Samboja – Muara Jawa) sepanjang 30,050 km; Seksi 3 (Muara Jawa – Palaran) sepanjang 18,300 km; Seksi 4 (Palaran– Jembatan Mahkota II) sepanjang 17,150 km; dan Seksi 5 (KM 13 – Sepinggan) sepanjang 11,500 km.

Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah perlu dilakukannya pembebasan lahan secepatnya agar dapat dilakukan konstruksi lebih lanjut sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan. Terkait pengusahaan Jalan Tol Samarinda – Bontang perlu dilakukan peninjauan ulang studi kelayakan dan *Detail Engineering Design* (DED) untuk menyesuaikan perhitungan kelayakan ekonomi dan finansial sesuai kondisi saat ini. Serta diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam persiapan pengusahaan Jalan Tol Samarinda – Bontang dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol.



### Rapat Pembahasan Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan

**R**apat Pembahasan Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengadakan rapat pembahasan proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan pada hari Senin (6/5). Rapat yang di pimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Reni Ahiantini ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan DJPI, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kepala Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan System Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kepala Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi, Badan Pengatur Jalan Tol dan karyawan d lingkungan DJPI.

Adapun pembahasan dalam rapat ini yaitu perlunya dilakukan update terkait data proyek KPBu infrastruktur dan jembatan antara lain status Jalan Tol Duripulo – Kp. Melayu, Ulujami– Tanah Abang, dan Pasar Minggu – Casablanca yang sudah memiliki badan usaha pelaksana dan telah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol.

Disampaikan oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan bahwa “Permasalahan terkait dengan komitmen pendanaan dari pemerintah melalui APBN pada beberapa ruas jalan sebesar Rp 69 Triliun, namun ketersediaan anggaran DJBM saat ini dialokasikan sebesar Rp 38 Triliun.

Pada tahun 2020 – 2024 Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah menyusun *longlist* pembangunan ruas jalan dengan mengacu pada masterplan sistem jaringan jalan. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan membutuhkan masukan untuk permasalahan pembiayaan beberapa proyek jalan dan jembatan yang sedang ditangani.

Masalah yang saat ini sedang ditangani yaitu mengenai operasi dan pemeliharaan jembatan Suramadu. Jalan bebas hambatan non tol ini rencananya akan dibiayain dengan skema AP, tetapi membutuhkan badan usaha untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan yang kemungkinan bisa menjadi *pilot project*.

Berdasarkan informasi dari BPJT terkait program pengusahaan jalan tol, saat ini terdapat 6 (enam) proyek *solicited* yang sedang di tahap pra-kualifikasi yaitu Balikpapan - Penajam Paser Utama, Semanan - Balaraja, Kamal - Tanjung Naga Rajeg, Akses Pelabuhan Patimbang, Tasikmalaya - Cilacap Dan Solo – Yogyakarta.

Kemudian informasi yang didapatkan dari Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan terdapat 3 (tiga) isu proyek penataan jalan di Provinsi Bali yaitu Jalur Logistik Gilimanuk – Padangbai, Lingkar Kota Denpasar, dan Akses Bandara Ngurah Rai arah selatan Bali.

Dalam beberapa kendala yang ditemukan, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi DJPI mengusulkan ruas jalan tol yang dapat menjadi quick win Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan tahun 2018, yaitu Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Mamminasata), Ringroad Bogor, dan Samarinda – Bontang.

## Focus Group Discussion Evaluasi Kajian Studi Kelayakan Proyek KPBSP SPAM Karian

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Kajian Studi Kelayakan Proyek KPBSP SPAM Karian diselenggarakan pada hari Rabu (8/5), di Jakarta. FGD membahas progress pelaksanaan KPBSP SPAM Karian yang telah mencapai 60% fisik pembangunan waduk dan *impounding* direncanakan dimulai tahun 2021. Kemudian, kesiapan *Water Conveyance* yang diusulkan oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA) melalui pinjaman. Lokasi *Water Conveyance* dari Serpong ke Vila Mutiara, direncanakan akan ada penambahan panjang *Water Conveyance* ± 5KM. Perubahan ini telah disepakati bersama, untuk tanah di Vila Mutiara masih dalam peninjauan dengan pemilik lahan.

Disisi lain, posisi ujung lahan Vila Mutiara berada 5 meter dari pagar jalan tol maka sedang dipertimbangkan jarak menjadi lebih dari 5 meter sebagai antisipasi apabila ada pelebaran jalan tol pada tahun mendatang.

Untuk kesiapan penyerapan air oleh *Offtakers* yaitu DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Lahan penyerapan air di daerah DKI Jakarta berada di Semanan dan Kamal Muara. Kota Tangerang berada di lokasi titik *offtake* di Larangan belum dibebaskan. Kota Tangerang Selatan lokasi titik *offtake* di Vila Mutiara. Jaringan distribusi perlu dilakukan identifikasi kesiapan masing-masing *offtaker* untuk pembangunan pipa distribusi. Pipa distribusi meliputi panjang pipa, Jumlah Sambungan Rumah (SR), sumber dana dan sebagainya. Proyek ini bertujuan untuk menampung volume air dari curah hujan dan memberikan air bersih untuk Masyarakat sekitarnya.

## Rapat Pembahasan Admin Aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG)

Menindaklanjuti serah terima admin sebagai pengelola aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Bina Investasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, maka Direktorat Perumahan Kebijakan dan Evaluasi menyelenggarakan Rapat Pembahasan Admin Aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) Jumat lalu (10/5).

Beberapa pokok pembahasan dalam rapat tersebut yaitu pemberian *User Name* dan *Password Admin* telah dilaksanakan dan telah diterima oleh Subdirektorat Data dan Informasi. Kemudian, dalam rangka pelaksanaan dan operasionalisasi SIRENG diperlukan sebuah TIM yang anggotanya meliputi Direktorat Perumahan Kebijakan dan Evaluasi (PKE), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

(PPDPP). TIM tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pendaftaran Asosiasi

Pengembang dan Pengembang Perumahan sebagai syarat penyaluran KPR Bersubsidi, melakukan mekanisme penghapusan data keanggotaan Pengembang Perumahan, serta mekanisme perbaikan data Pengembang Perumahan.

Penyempurnaan aplikasi SIRENG dilakukan guna mendukung pelaksanaan ARSAP4 yaitu dengan integrasi data dengan *Online Single Submission* (OSS), yang digunakan Pemerintah di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu, tindak lanjut dari rapat tersebut antara lain akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang menaungi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) untuk menggali informasi bagaimana mengintegrasikan SIRENG dilihat dari segi kebijakan dan teknis untuk OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Serta, melakukan reviu bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui bagian Hukum dan Komunikasi Publik terkait dengan perubahan Permen Nomor 24/PRT/M/2018





## Rapat Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

**D**irektorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pastikan kesiapan Bank BTN dan Himpera dalam penyaluran BP2BT Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengadakan rapat pelaksanaan penyaluran program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Rabu (22/5) lalu bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Acara ini dilaksanakan guna melihat kesiapan Bank Tabungan Negara dan Himpunan Pengusaha Perumahan (Himpera) dalam mendukung pelaksanaan BP2BT.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal penting antara lain mengenai target BP2BT sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar 100 unit. Sedangkan disisi lain pihak Himpera menyampaikan bahwa penerima BP2BT memiliki penghasilan diatas 4 juta rupiah karena cicilannya lebih besar 10 – 15% dari skema FLPP maupun SSB yang tidak dapat mengakses KPR FLPP maupun SSB.

Selain itu Himpera menyampaikan bahwa Karawang dan Cilegon merupakan lokasi yang potensial untuk piloting BP2BT dan sudah tersedia 10.000 unit untuk mendukung pelaksanaan BP2BT. Namun, hal ini terkendala karena dua lokasi tersebut Pemerintah kota/kabupatennya belum bisa mengeluarkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Menanggapi hal tersebut BTN menyampaikan bahwa pihaknya memetakan selain dua lokasi tadi masih ada 4 lokasi potensial untuk pelaksanaan BP2BT, yaitu Bekasi, Bogor, Tangerang dan Cikarang. Selain itu BTN juga rencananya akan menunjuk kantor cabang piloting sesuai dengan lokasi pelaksanaan piloting BP2BT. Selain itu, BTN juga menyarankan untuk melakukan reviu peraturan

Terkait SLF, perwakilan Ditjen Cipta karya memberikan masukan agar untuk menentukan lokasi *piloting* di daerah yang sudah mengeluarkan SLF bangunan gedung meskipun belum pernah mengeluarkan SLF bangunan rumah sederhana karena lebih mudah dan untuk mempercepat prosesnya. Selain itu, untuk percepatan pelaksanaan SLF perlu dilakukan kerjasama dengan Kementerian dalam Negeri karena Pemerintah Kabupaten/kota menginduk ke Kemendagri.

Himpera menyatakan kedepan, untuk mendukung program BP2BT dan penentuan lokasi yang tepat, akan didata jumlah rumah dan calon penerima manfaat dengan penghasilan diatas 3,5 Juta rupiah. Selain menyampaikan mengenai kesiapannya untuk pelaksanaan BP2BT juga membahas mengenai permasalahan aplikasi sistem registrasi pengembang (SIRENG) dan akreditasi, registrasi dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan (ARSAP4) yang memiliki ketidaksamaan data antara yang dimiliki perbankan dengan data SIRENG karena adanya pergantian pengelola ARSAP4 dan SIRENG sehingga pengajuan oleh pengembang ditolak perbankan karena dianggap tidak terdaftar oleh perbankan. Menanggapi permasalahan tersebut, hal ini akan ditindaklanjuti oleh DJPI.

RUMAH  
CONTOH

Dilarang mengutip,  
mempublikasikan  
atau mereproduksi  
konten buletin ini  
dalam bentuk apapun  
tanpa izin dari  
penerbit.  
Hak Cipta dilindungi  
undang-undang.

### PELINDUNG

Dr. Ir. Eko D Herpoerwanto, MCP

### PENASEHAT

Ir. Irma Yanti, MT

### PENGARAH

- Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT
- Ir. Arvi Argyantoro, MA
- Reni Ahiantini, ST, M.Sc
- Adang Sutara, SE, M.Si
- R. Haryo Bekti Martoyoedo, ST, M.Sc

### PEMIMPIN REDAKSI

- Dedy S. Budisusetyo, SH, MT

### REDAKTUR PELAKSANA

- Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si

### REDAKSI

- Fenty Meilisya Syafril, S.Sos, M.Si

### EDITOR

- Anggoro Widyastika, SH, MH
- Putrawan, SH

### DESAINER

- Fahmi Nurhuda S.Ds
- Michael Adha

### FOTOGRAFER

- Komarudin
- Dwi Cristianto

### REPORTER

- Medika Yogi P, S.I. Kom
- Riyan Aditya P, S.I. Kom
- Shara Vadya, S.I. Kom

### SEKRETARIAT DAN SIRKULASI

- Rubi Esti Aprillia, SH, MH
- Dony Triastomo, SE. MSI
- Yudhistira Adinugroho, SH